

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK
USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN TELUK BINTAN

TAHUN 2014

JURNAL



Oleh

SADAM AZHARI

NIM: 100565201146

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2015

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2014

SADAM AZHARI

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

ABSTRAK

Program kelompok usaha bersama akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya sendiri mau berpartisipasi ataupun mau menjalankan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh. Pemerintah Kecamatan Teluk Bintan banyak membuat program pengentasan kemiskinan, salah satunya ialah program kelompok usaha bersama, salah satu faktor utama penulis ingin meneliti masalah tersebut adalah karena menurut penulis program tersebut adalah program yang sangat efektif untuk dijalankan, karena sangat membantu masyarakat yang ingin membuat usaha tetapi kekurangan modal. Namun tidak semua program yang dibentuk tersebut berjalan dengan lancar, ada sebagian yang mengalami kegagalan.

Yang menjadi fokus penelitian ini ialah pada beberapa kelompok usaha bersama di Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2014, yaitu kelompok kelompok usaha bersama di Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Tembeling, Desa Pangkil, dan Desa Pengujan, sedangkan Desa Penaga dan Desa Bintan Buyu tidak memiliki kelompok kelompok usaha bersama.

Faktor kemauan masyarakat Kecamatan Teluk Bintan untuk berpartisipasi adalah memiliki motivasi untuk mendapatkan pekerjaan dan modal dengan harapan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tercapailah kesejahteraan. Tetapi ketika faktor harapan, kebutuhan serta keuntungan dari program ini tidak mereka temui maka partisipasi terhenti, inilah yang menyebabkan sebagian kelompok usaha bersama tidak berjalan.

Kata kunci : Partisipasi, Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama

PEOPLE'S PARTICIPATION IN JOINT BUSINESS PROGRAM GROUP (KUBE)
SUB IN GULF BINTAN 2014

SADAM AZHARI

Science Student Government, Faculty of Social UMRAH

Abstract

Program business groups will go well if the people themselves want to participate or want to run the business in earnest. Teluk Bintan government made a lot of poverty alleviation programs, one of which is the joint venture group programs, one of the main factors the authors wanted to examine this problem is because according to the author of the program is a very effective program to run, because it helps people who want to make an effort but lack of capital. But not all programs are created is running smoothly, there are some that have failed.

Which is the focus of this study is on some business groups in the Gulf District of Bintan In 2014, a group of business groups in the village of Tembeling Tanjung, Tembeling Village, Pangkil village, and the Pengujan village, while Penaga Village and Bintan Buyu Village not have Joint Business Group ,

Factors Teluk Bintanpublic willingness to participate is to have the motivation to work and capital in the hope of the They can meet their daily needs and result wellbeing. But when the factor of expectations, needs and reward of the program they do not meet the participation stalled, this is causing some business groups are not running.

Keywords: Participation, Community, Business Group

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN TELUK BINTAN TAHUN 2014

A. Latar Belakang

Kelompok usaha bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga/keluarga-keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial. Penerima bantuan stimulant (pendorong) pemberdayaan adalah para keluarga binaan sosial (KBS) yang tergabung dalam KUBE, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan atau kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha. Program KUBE dibentuk oleh pemerintah termasuk salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang ekonominya lemah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan. Mengacu kepada defenisi KUBE diketahui bahwa KUBE merupakan perkumpulan atau kelompok masyarakat miskin yang dibentuk atas prakarsa sendiri dan tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Dimana KUBE ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pada anggota, dan memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha.

Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana langsung kepada kelompok KUBE, menurut peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013, penerima bantuan tersebut adalah kelompok masyarakat miskin yang produktif dan memiliki kegiatan ekonomi produktif. Dimana masyarakat miskin itu, diwadahi dalam kelompok usaha bersama (KUBE). Setiap kelompok

terdiri dari 10 (sepuluh) kepala keluarga (KK) dengan susunan kepengurusan : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang bendahara, 1 (satu) orang sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota. Dana bantuan usaha ekonomi produktif melalui rekening kelompok usaha bersama tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (Sumber : Perbup No 8 Tahun 2013).

Program KUBE akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya sendiri mau berpartisipasi ataupun mau menjalankan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Pemerintah kecamatan Teluk Bintang banyak membuat program pengentasan kemiskinan, salah satunya ialah program KUBE, salah satu faktor utama penulis ingin meneliti masalah tersebut adalah karena menurut penulis program tersebut adalah program yang sangat efektif untuk dijalankan, karena sangat membantu masyarakat yang ingin membuat usaha dalam keadaan kekurangan modal. Kecamatan Teluk Bintang terdiri dari satu kelurahan dan lima desa yaitu, Kelurahan Tembeling Tanjung, Desa Pangkil, Desa Pengujan, Desa Penaga, Desa Bintang Buyu dan Desa

Tembeling. Program KUBE tersebut beranekaragam, masing-masing daerah berbeda, ada dalam bentuk pertanian, daur ulang barang bekas, peternakan dan lain-lain.

Rahardjo Adisasmita, (2006:38) Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam suatu program pemerintah merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan atau kelurahan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan atau kelurahan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi). Efektivitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target yang direncanakan. Jika rasio tersebut lebih besar dari satu berarti efektif, dan sebaliknya jika rasio tersebut lebih kecil dari satu berarti tidak efektif. Sedangkan efisiensi dimaksudkan yaitu dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan kebawah. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penhematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti inefisiensi.

Melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu

adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat akan terwujud secara optimal pula. (Rahardjo Adisasmita, 2006:39)

Alasan penulis meneliti di Kecamatan Teluk Bintan ialah karena lokasi yang sangat strategis untuk kegiatan KUBE dan bantuan dana yang besar di berikan oleh pemerintah belum betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar, karena kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan lokasi tersebut dan dana bantuan dari pemerintah yang cukup besar, serta penulis juga ingin melihat apa yang terjadi sehingga ada sebagian kelompok KUBE yang berhasil dan ada kelompok KUBE yang gagal dan penulis juga ingin melihat sejauh mana partisipasi para anggota kelompok KUBE dalam mensukseskan kegiatan kelompok KUBE yang ada di kecamatan Teluk Bintan.

Fokus penelitian ialah pada beberapa Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Teluk Bintang Tahun 2014, yaitu kelompok KUBE di Kelurahan Tembeling Tanjung terdapat empat jumlah kelompok KUBE yang masih aktif dan tiga kelompok sudah tidak aktif, di Desa Tembeling hanya satu kelompok yang masih aktif dan satu kelompok sudah tidak aktif lagi, di Desa Pangkil juga hanya terdapat satu kelompok yang masih aktif dan satu kelompok sudah tidak aktif lagi, dan Desa Pengujan terdapat satu kelompok yang masih aktif sedangkan dua kelompok sudah tidak aktif lagi, sedangkan Desa Penaga dan Desa Bintang Buyu tidak memiliki kelompok KUBE.

Fenomena yang terjadi ialah tidak semua berjalan dengan baik, hanya beberapa kelompok saja yang masih aktif. Padahal bantuan anggaran dana dari Pemerintah merata di setiap masing-masing kelompok, dan masing-masing masing-masing kelompok mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 30.000.000. Sesuai dengan keadaan yang terjadi pada fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana partisipasi masyarakat dalam program KUBE tersebut yaitu dengan judul penelitian **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Teluk Bintang Tahun 2014”**.

B. Landasan Teori

1. Partisipasi

Kajian ilmu pemerintahan memusatkan perhatiannya kepada gerak masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan, sejalan dengan pendapat Djopari dkk, (2008:12) menyebutkan bahwa "Ilmu pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat." Hal ini sejalan dengan pendapat Kasnawi dan Ramli, (2006:36) menyebutkan bahwa "salah satu metode yang telah dikenal dalam teori pembangunan masyarakat adalah teori partisipasi masyarakat. Dari teori Djopari dkk, Kasnawi dan Ramli penulis dapat menyimpulkan bahwa, keberhasilan pembangunan dilihat dari adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pencapaian program pembangunan yang di buat oleh pemerintah sebagaimana visi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat.

Pendapat Muluk yang menyebutkan bahwa partisipasi sebagai suatu layanan dasar dan bagian integral dari local government, partisipasi publik merupakan alat bagi good government. "Pengertian partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijakan pembagunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. Artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat". (Muluk, 2007:52). Dari pengertian diatas, penulis berpendapat bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan hendaklah bersifat emansipatif artinya masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa pembangunan itu adalah dari, oleh dan

untuk masyarakat. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Tangkilisan (2005 : 321) yang dikutip pada Genius (2013) menyatakan bahwa pada dasarnya partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Dari pendapat Tangkilisan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, partisipasi merupakan keterlibatan seseorang pada bagian kegiatan bersama yakni adanya kesadaran dalam diri seseorang untuk ikut serta dalam pembangunan. Mengacu pendapat Moeljarto Supriatna (2000 : 209) yang dikutip pada Genius (2013) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi rakyat dalam pembangunan yaitu :

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisai daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap.

- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana masyarakat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas *zone* (wawasan) penerima proyek pembangunan.
- f. Partisipasi menompang pembangunan.
- g. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.

Partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi setara. Sedangkan keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Partisipasi juga merupakan salah satu komponen dalam pembangunan masyarakat oleh karena itu kegiatan pembangunan erat kaitannya dengan usaha

membakitkan partisipasi. Menurut Adisasmita (2006:38) yang dikutip pada Genius (2013) menyatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah berkaitan dan melibatkan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Kemudian Kaho (2007:125) yang dikutip pada Genius (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian *intern* dalam setiap penyelenggaraan Otonomi Daerah yakni dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting.

Pendapat Adisasmita dan Kaho, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan yang diberikan kepada masyarakat merupakan program pemerintah yang ditunjukkan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat untuk membangun wilayahnya masing – masing sesuai dengan kebutuhan. Adisasmita (2006:117) juga menyebutkan meskipun paradigma pembangunan berazaskan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan masih tetap penting, namun terdapat pergeseran menuju paradigma pembangunan partisipasi pelaku pembangunan ekonomi masyarakat, yang menuntut kerangka perencanaan pembangunan spasial (tata ruang), kebijakan pembanguan berwawasan spasial itu harus dapat menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi dan produktivitas penduduk/masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana dapat mendorong partisipasi masyarakat, terutama keluarga-keluarga berpendapatan rendah dalam proses pembangunan.

- b. Bagaimana dapat menciptakan dan meningkatkan kegiatan perekonomian antar sektor di tingkat pedesaan dan antar pedesaan.

Dalam kaitannya dengan pelaku – pelaku yang termasuk didalam aktivitas pembangunan, Nelson dalam (Tangkilisan, 2005:323) yang dikutip pada Genius (2013) menyatakan bahwa ada dua macam bentuk partisipasi yaitu :

1. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat, di mana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama suatu kegiatan pembangunan.
2. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi di antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan di mana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka program pemerintah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama program KUBE. Dengan demikian pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam program KUBE di Kecamatan bisa berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan kutipan di atas bermakna bahwa partisipasi masyarakat perlu di gerakkan agar program KUBE di Kecamatan berjalan dengan baik. Masyarakat harus berperan aktif untuk mensukseskan program KUBE yang telah dibuat, sehingga hasil yang di peroleh memiliki manfaat yang besar bagi semua masyarakat.

Sahidu dalam (Tuty irawaty, 2009) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motivasi, harapan, *needs*,

rewards dan penguasaan informasi. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki.

Partisipasi dapat pula diartikan sebagai sebuah hubungan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan dalam proses pembangunan yang berkorelasi setara. Sedangkan keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Berdasarkan kutipan di atas penulis menyimpulkan bahwa program KUBE bisa berjalan efektif dan efisien apabila masyarakatnya sendiri mau berpartisipasi, khususnya anggota kelompok KUBE tersebut.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syarakat yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan

manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Sesuai dengan pendapat Strong Djopari dkk, (2008:211) mengemukakan bahwa "pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi".

Ditambahkan oleh Parson (Sunarto, 2000:56) bahwa masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (*self subsistent*), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Salam (2007:262) mengungkapkan bahwa masyarakat

dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan advokasi partisipasi melalui mobilisasi.

4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013, Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Mengacu kepada defenisi KUBE diketahui bahwa KUBE merupakan perkumpulan atau kelompok masyarakat miskin yang dibentuk atas prakarsasendiri dan tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Dimana KUBE ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pada anggota, dan memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha.

Program KUBE merupakan salah satu program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang ekonominya lemah, oleh karena itu pemberdayaan

partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program KUBE yang diadakan oleh pemerintah. Pemberdayaan partisipasi masyarakat hingga di tingkat lembaga – lembaga lokal , akan dapat menggerakkan perekonomian wilayah . sejalan dengan itu , dipastikan social capital akan meningkat . Namun demikian pemberdayaan partisipasi masyarakat di Indonesia khususnya pada saat sekarang tidak berkorelasi dengan meningkatnya social capital , masyarakat saat ini memang sedang ‘ berdaya ‘ tetapi belum mengkait dengan kenaikan kesejahteraan sebaliknya mengakibatkan ekonomi memburuk bahkan menimbulkan perilaku – perilaku sekelompok masyarakat yang jauh dari tertib hukum sebagai modal utama untuk membangun modal sosial. (Nugroho , 2004 ; 404).

C. HASIL PENELITIAN

1. Partisipasi Horizontal

Partisipasi horizontal ialah partisipasi yang dilakukan sesama warga atau anggota masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kemampuan berprakarsa dalam menyelesaikan secara bersama atau kegiatan pembangunan.

a. Partisipasi Pada KUBE Aktif

Dari hasil wawancara penulis kepada empat orang ketua KUBE yang aktif maka secara umum ketua dan seluruh anggota pada dasarnya cukup berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah.

Hasil dari wawancara maka penulis menganalisa bahwa partisipasi yang dilakukan oleh KUBE yang aktif di Kecamatan Teluk Bintan tidak hanya sekedar cukup baik atau jalan tetapi berjalannya secara terus menerus. Partisipasi yang menyeluruh dan kontinyu inilah alasan kenapa KUBE yang ada di Kecamatan Teluk Bintan tetap exis.

b. Partisipasi KUBE tidak aktif

Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Teluk Bintan yang tidak aktif berjumlah 7 (tujuh) kelompok diantaranya adalah kelompok Mekar Jadi, Karya Cipta, Harapan Kita, Karya Utama, Cendana, Cahaya Terang, dan kelompok Sejahtera. Sebenarnya kelompok ini pada awalnya semua anggota aktif berpartisipasi, akan tetapi partisipasi yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama ini agak lemah dibandingkan dengan kelompok yang aktif sehingga pada akhirnya kelompok ini menjadi bubar atau tidak aktif.

Analisa penulis bahwa keadaan partisipasi ketua dan anggota yang terjadi pada KUBE yang tidak aktif ini membuktikan kebenaran teori yang ada. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan existensinya program pemerintah di tengah kehidupan pembangunan bangsa ini. Walaupun sumberdaya, modal, fasilitas serta program pemerintah adalah cukup bagus akan tetapi partisipasi masyarakat kurang bahkan tidak ada maka program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik.

c. Bentuk partisipasi horizontal

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan ketua dan anggota KUBE dalam menjalankan program mereka adalah:

1. Menghadiri setiap pertemuan atau rapat.
2. Menambah dana dengan modal sendiri

2. Partisipasi Vertikal

Partisipasi Vertikal adalah partisipasi diantara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.

1. Menghadiri setiap pertemuan
2. Partisipasi dalam menerima dan menyalurkan dana

3. Faktor-faktor Partisipasi

Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini haruslah diwujudkan dengan cara memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran, dan waktu, karna untuk menyumbangkan uang masyarakat belum mampu masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemeliharaan pembangunan yang telah dihasilkan selama ini sangat di perlukan partisipasi masyarakat untuk merawat serta memelihara pembangunan yang ada, dengan demikian pembangunan akan terus terlaksana apabila masyarakat dan Kelurahan dapat meberikan kepeduliannya bersama – sama dengan segala kemampuan untuk meningkatkan pemberdayaan, hal ini sesuai dengan agenda yang paling kritikal di dalam pembangunan sektor

lingkungan , memperdayakan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan adalah proses pembangunan modal sosial , pengalaman memperlihatkan bahwa sosial capital adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah perkotaan (Nugroho , 2004 ; 404).

Masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan, oleh sebab itu masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan. Akan tetapi kadang kala partisipasi masyarakat belum maximal dalam setiap program pemerintah diantaranya adalah program kelompok usaha bersama (KUBE). Tentunya ada faktor-faktor yang ada dalam partisipasi masyarakat dalam KUBE ini.

1. Faktor Kemauan Berpartisipasi

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *reward* dan penguasaan informasi. (Sahidu, 1998) dalam (Tuty Irawaty, 2009).

4. Faktor Pendorong Partisipasi

Faktor yang mendorong untuk berpartisipasi adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki. (Sahidu, 1998) dalam (Tuty Irawaty, 2009).

a. Faktor Pendidikan

b. Faktor Modal

c. Faktor Pengalaman

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari bentuk partisipasi masyarakat dalam program KUBE di Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2014 penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Penulis menganalisa bahwa partisipasi yang dilakukan oleh KUBE yang aktif di Kecamatan Teluk Bintan tidak hanya sekedar cukup baik atau jalan tetapi berjalan secara terus menerus. Partisipasi yang menyeluruh dan kontinyu inilah alasan kenapa KUBE yang ada di Kecamatan Teluk Bintan tetap exis. Partisipasi ketua dan anggota yang terjadi pada KUBE yang tidak aktif ini membuktikan kebenaran teori yang ada. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan existensinya program pemerintah di tengah kehidupan pembangunan bangsa ini. Walaupun sumber daya, modal, fasilitas serta program pemerintah adalah cukup bagus akan tetapi partisipasi masyarakat kurang bahkan tidak ada maka program pemerintah tidak bisa berjalan dengan baik.

Faktor kemauan masyarakat Kecamatan Teluk Bintan untuk berpartisipasi adalah memiliki motivasi untuk mendapatkan pekerjaan dan modal dengan harapan mereka, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga tercapailah kesejahteraan. Tetapi ketika faktor harapan, *needs* serta *reward* dari program ini tidak mereka temui maka partisipasi terhenti, inilah yang menyebabkan sebagian KUBE tidak berjalan. Diantara permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penanganan dalam pemasaran.

Apalagi KUBE yang bergerak di bidang pertanian walaupun keberhasilan dalam bidang produksi akan tetapi pemerintah tidak dapat membantu di bidang pemasaran maka masyarakat tetap tidak akan mendapat keuntungan (rewards), sehingga mereka hanya mendapatkan keletihan dan waktu yang terbuang, inilah yang menyebabkan mereka tidak mau lagi ikut berpartisipasi dalam program KUBE tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa mereka kurang dalam penguasaan informasi.

Motivasi masyarakat yang tidak serius atau sekedar coba-coba ini menjadikan partisipasi tidak akan berjalan dengan maksimal dikarenakan separuh hati, ini berlaku pada anggota KUBE yang gagal. Bagi mereka KUBE hanya sekedar untuk mendapatkan modal saja, mereka ini sudah memiliki pekerjaan sehingga bagi mereka kegagalan dalam KUBE tidak menjadi apa-apa dibandingkan anggota KUBE yang menjadikan KUBE sebagai usaha/pekerjaan utama mereka. Dari hasil penelitian seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul sudah ada usaha dalam artian mereka dibantu karena usaha yang sudah ada masih perlu pembinaan dan bantuan bukan memberikan modal pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki sama sekali modal usaha.

Analisa penulis dari penelitian dilapangan tidak ditemukan masalah penyelewengan-penyelewengan pemanfaatan dan penyaluran dana bantuan tersebut, namun dalam pola pemanfaatan dan penyaluran dana bantuan tersebut oleh ketua KUBE dengan anggotanya itu berbeda-beda dan tidak diatur oleh pemerintah, hal tersebut langsung diserahkan ke ketua kelompok, kebebasan yang diberikan oleh

pemerintah kepada masing-masing ketua kelompok bisa mengakibatkan terjadinya peluang penyalahgunaan dana bantuan tersebut. Seperti pola pembagian langsung kepada setiap pribadi anggota yang masing-masing menerima 3 juta, sehingga setiap pribadi merasa lepas dan tidak ada pengikat lagi.

Sebagian besar tingkat pendidikan dari anggota KUBE di Kecamatan Teluk Bintan sudah cukup sebagai sumber daya manusia yang dapat di bina dan di kembangkan karena pendidikan setingkat SMA sangat mudah dan cepat sekiranya ditingkatkan atau di kembangkan melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan tambahan yang mendukung majunya program KUBE di Kecamatan Teluk Bintan. Apalagi penulis memandang keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia cukup baik dengan diadakannya pembinaan dan pelatihan. Faktor modal juga sangat menentukan jalannya setiap bentuk usaha bagi KUBE yang tidak mengandalkan bantuan pemerintah sebagai sumber modal bergerak tetapi ditambah dengan modal mandiri, maka kegiatan KUBE ini kebanyakan tetap exis.

Penulis juga melihat sebagian dari KUBE yang ada di Kecamatan Teluk Bintan mereka telah memiliki pengalaman sebelum adanya program pemerintah yaitu program kelompok usaha bersama. Akan tetapi kebanyakan dari mereka berusaha sendiri-sendiri dan tidak ada dalam wadah kelompok.

2. Saran

Dalam penelitian ini penulis telah dapat memahami gambaran keadaan KUBE yang ada di kecamatan teluk bintang, oleh karena itu apabila pemerintah menginginkan program KUBE ini tetap berkembang dan partisipasi masyarakat tetap dapat dimanfaatkan maka penulis menyarankan :

1. KUBE yang masih aktif agar tetap terus dibina bahkan hendaknya pemerintah meningkatkan sumber daya manusia serta menjadi fasilitator dalam mencari mitra binaan yang lebih besar lagi.
2. Agar pemerintah bisa lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan khusus kepada masing-masing kelompok KUBE sehingga bisa menciptakan hasil yang lebih baik lagi.
3. Agar pemerintah betul-betul memperhatikan soal penyeleksian bagi anggota masyarakat yang akan terlibat dalam program KUBE dimasa akan datang.
4. Agar di bentuk suatu kelompok untuk pengawasan dilapangan oleh pemerintah, sehingga aktivitas/kegiatan kelompok usaha bresama bisa berjalan sesuai yang diharapkan.
5. Hendaknya masalah pemasaran atau penguasaan informasi betul-betul serius dibina oleh pemerintah agar program KUBE dapat terus berjalan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Bunging, Burhan , 2009. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta ; Prenada Media Group.
- Djopari, Jrg dan Ratnia Solihah. 2008. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Genius, 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kelurahan Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2011*. Skripsi .Umrah .Tanjungpinang.
- Junaidi, Sayid. 2013 . *Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemberdayaan masyarakat miskin*. Jurnal Umrah. Tanjungpinang.
- Kasnawi, M. Tahir dan Ramli AT.2007. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Ixey j. 2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakrya.
- Muluk, Mujibur Rahman K, 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah (Sebuah Kajian Administrasi Publikdengan Pendekatan Berpikir istem)*. Malang, Bayu Media Publishing.
- Nugroho, Iwan. dan Dahuri , Rokhmin. 2004. *Pembangunan Wilayah* . LP3ES, Jakarta.
- Riyadi dan Dedy Supryadi Bratakusuma, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia Pustaka Umum.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djambatan.

Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Range dan Determinan*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta, FE UI.

B. Internet dan Website

Irawaty, Tuty, 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemauan Masyarakat untuk Berpartisipasi*, (<http://tutywaty.wordpress.com>, diakses 10 April 2015, 16:30 Wib).

Kecamatan Teluk Bintang, 2011. *Profil Kecamatan Teluk Bintang*. (<http://kecamatantelukbintang.blogspot.com>, di akses 15 April 2015, 13:30 Wib).

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Bintang Nomor 80/2013; *Tentang Pelaksanaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2014*.

Perda No.11 tahun 2007 dan Perda No.12 tahun 2007 ;*Tentang Pembentukan Kelurahan/desadan Kecamatan Baru Pada Tahun 2007 Kecamatan Teluk Bintang*.